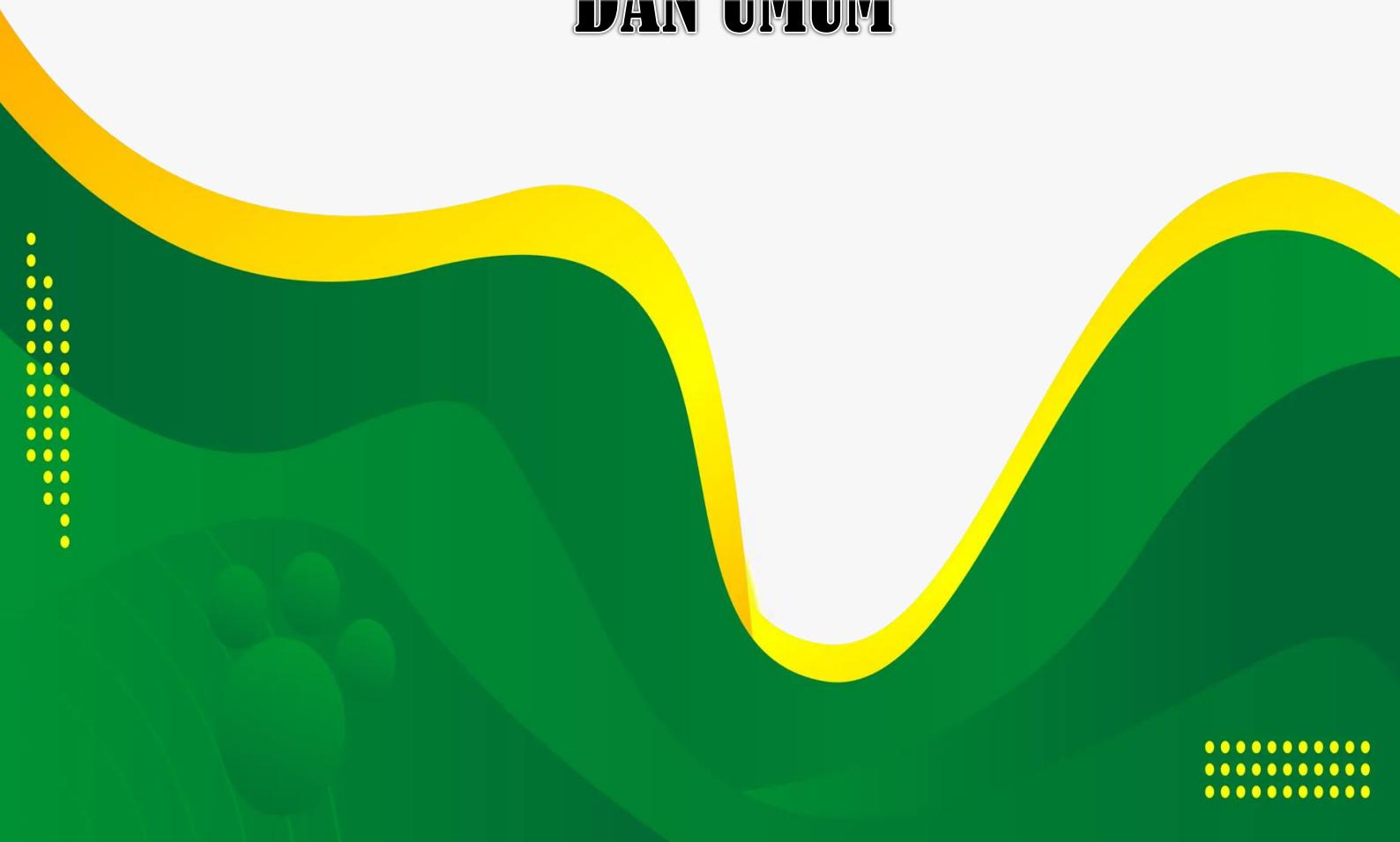




# **LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

**BIRO KEUANGAN, PENGADAAN  
DAN UMUM**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 yang akan memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum.

Secara umum kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 berjumlah 6 (enam) indikator kinerja Sasaran Kegiatan (SK). Keseluruhan indikator tersebut akan dilakukan pengukurannya pada akhir tahun anggaran. Namun untuk melihat proses pengukuran dan gambaran pencapaian per Triwulan telah diidentifikasi untuk proses pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh indikator Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sampai berakhirnya Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2025

Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan  
Umum

Todillah

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**\_\_\_\_\_

**DAFTAR ISI**\_\_\_\_\_

**DAFTAR TABEL**\_\_\_\_\_

**DAFTAR LAMPIRAN**\_\_\_\_\_

**IKHTISAR EKSEKUTIF**\_\_\_\_\_

**BAB I PENDAHULUAN**\_\_\_\_\_

- 1.1. Latar Belakang .....
- 1.2. Dasar Hukum .....
- 1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....
- 1.4. Organisasi dan Tata Kerja .....
- 1.5. Maksud dan Tujuan .....
- 1.6. Metodologi Pengukuran Kerja .....
- 1.7. Sistematika Laporan .....

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**\_\_\_\_\_

- 2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2025
  - 2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional .....
  - 2.1.2. Sasaran Kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum .....
- 2.2. Rencana Kinerja Tahunan .....
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....
- 2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**\_\_\_\_\_

- 3.1. Pengelolaan Kinerja .....
- 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama .....
- 3.3. Realisasi Rencana Aksi .....
- 3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran .....

**BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**\_\_\_\_\_

- 4.1. Kesimpulan .....
- 4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....

**LAMPIRAN**\_\_\_\_\_

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 Tabel 2.

Target dan Realisasi Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum

Periode Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3. Capaian Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Periode Triwulan II

Tahun 2025

Tabel 4. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum

Periode Triwulan II Tahun 2025

Tabel 5. Dinamika Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Lampiran 2. Realisasi Anggaran dan Fisik sampai bulan Maret Tahun 2025 Lampiran 3. Kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Triwulan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum menyajikan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) lingkup Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum dalam mendukung pencapaian kinerja tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada Triwulan II Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum akan mempertanggungjawabkan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum. Sasaran Kegiatan tersebut adalah: 1) Terwujudnya tata kelola Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik, 2) Tatakelola anggaran Sekretariat Utama yang akuntabel dan berkualitas, dan 3) Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, protokol dan rumah tangga yang baik. Guna mencapai Sasaran Kegiatan yang diharapkan, Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik per-Triwulan.

Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan II Tahun 2025, pada prinsipnya merupakan kinerja yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Sehingga pada laporan Triwulan II capaian kinerja disajikan untuk menggambarkan capaian proses pengukurannya. Melalui identifikasi terhadap proses pencapaian kinerja di Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum secara rinci, kondisi capaian kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana table 4.

Adapun dari sisi anggaran pada periode Triwulan II Tahun 2025 Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 40.468.516.402,- atau 8,28% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 92.588.237.000,-. Dengan demikian, dari target yang telah ditetapkan capaian kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 proses yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja secara umum cukup baik. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya perlu dilakukan beberapa upaya dalam rangka pengendalian untuk pencapaian sesuai target.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Memasuki tahun ke-2 pelaksanaan amanat Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada Tahun 2025 akan mendukung program Dukungan Manajemen dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan periode Triwulan II Tahun 2025 akan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2022 – 2025; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagaimana pelaksanaan pemantauan Renja K/L dan pelaporan data dan realisasinya sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, hasil pemantauan kinerja lingkup Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada periode Triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam bentuk laporan kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum selama Tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama pada periode yang akan dating.

#### **1.2. Dasar Hukum**

Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2025;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor SP. DIPA-125.01-0/2025 pertanggal 2 Desember 2024.

### **1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum mempunyai tugas: Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Biro keuangan, Pengadaan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perpendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak;
2. Pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan;
3. Pengelolaan barang milik negara;
4. Pelaksanaan pelaporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Utama;
5. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
6. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
7. Pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

### **1.4. Organisasi dan Tata Kerja**

Sebagai unit kerja eselon II di Sekretariat Utama Badan Pangan Nasional, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional dilaksanakan oleh 2 (dua) Koordinator, yaitu Koordinator Kelompok Substansi Keuangan, dan Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan. Masing – masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinator Kelompok Substansi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perpendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian

dan penerbitan Surat Perintah Membayar, urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Terdiri atas 3 Subkelompok Substansi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Subkelompok Substansi Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak dan penyiapan bahan pengujian Surat Perintah Membayar;
  - b. Subkelompok Substansi Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan
  - c. Subkelompok Substansi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional.
2. Koordinator Kelompok Substansi Pengelola Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan penerbitan barang milik negara, urusan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Terdiri atas 2 Subkelompok Substansi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Subkelompok Substansi Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan penertiban barang milik negara; dan
- b. Subkelompok Substansi Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

## **1.5. Maksud dan Tujuan**

Laporan Triwulan II Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan Triwulan II adalah menilai capaian Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sampai periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai Indikator Kinerja Kegiatan.

## **1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum periode Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan II Tahun 2025 dengan target keuangan sesuai lembar ke-3 DIPA Badan Pangan Nasional sebesar 20%.

## **1.7. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

### **Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Mencakup Renstra Sekretariat Utama, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi mengenai pengelolaan kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Realisasi Aksi s.d. Triwulan II Tahun 2025

### **Bab IV PENUTUP**

Berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Stategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2025**

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi di Badan Pangan Nasional, Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2022 – 2025 menjadi dasar bagi unit kerja eselon II dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance score card* (BSD) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

##### **2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2025, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 – 2025 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong“. Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 -2025, yakni:

“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan“

Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum akan mendukung pelaksanaan misi: Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum adalah untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi ke – 2 yaitu: Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

### **2.1.2. Sasaran Kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum**

Dalam melaksanakan kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum akan mendukung Sasaran Program (SP): Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. Serta 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan melalui Sasaran Kinerja (SK): SK1: Terwujudnya tata kelola Keuangan, Pengadaan dan Umum yang baik, melalui indikator: a) Opini BPK atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional, dan b) Tingkat kepuasan layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum. Pelaksanaan melalui SK2: Tatakelola anggaran, Sekretariat Utama yang akuntabel dan berkualitas, melalui indikator: Nilai Kinerja Anggaran. Dan pelaksanaan melalui SK3: Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan pimpinan, protocol dan rumah tangga yang baik, melalui indikator: a) Tingkat kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi terhadap layanan bagian tata usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga, b) Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkungan eselon I Badan Pangan Nasional, dan c) Realisasi anggaran lingkup eselon I Badan Pangan Nasional.

### **2.2. Rencana Kinerja Tahunan**

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dilaksanakan melalui kegiatan utama: 6874 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional dengan alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA-125.01- 0/2025 pertanggal 2 Desember 2024, Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum mendapat alokasi sebesar Rp. 89.856.566.000,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

### **2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing – masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 1 berikut

**Tabel 1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya tata pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Layanan Umum yang baik	1.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,00 Nilai
		1.2	Indeks Pengelolaan Aset	2,25 Indeks
		1.3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	52,54 Nilai
		1.4	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,40 Skala Likert (1 – 5)

Perjanjian Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 tersaji dalam lampiran 1.

#### **2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2025, Badan Pangan Nasional secara mandiri telah menggunakan Bagian Anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Alokasi anggaran sesuai DIPA untuk Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sebesar Rp. 89.856.566.000,- untuk pendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Pengelolaan Kinerja**

Capaian Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 menggunakan sasaran kegiatan dan indikator dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2022 – 2025. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Sangat Berhasil        | : Jika Capaian Kinerja > 90% |
| 2. Berhasil               | : > 80% - 90%                |
| 3. Cukup Berhasil         | : > 60% - 80%                |
| 4. Kurang Berhasil        | : > 50% - 60%                |
| 5. Sangat Kurang Berhasil | : $\leq 50\%$                |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan pendekatan *maximize target*, apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Adapun rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk *maximize target*, adalah sebagai berikut:

*Maximize target* : Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Target kinerja menggunakan target per Triwulan sebagaimana tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Periode Triwulan II Tahun 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya tata pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Layanan Umum yang baik	1.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,00 Nilai
		1.2	Indeks Pengelolaan Aset	2,25 Indeks
		1.3	Indeks Tata Kelola Pengadaan	52,54 Nilai
		1.4	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,40 Skala Likert (1 – 5)

Dari tabel 2 di atas, semua indikator kinerja lingkup Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2025. Namun dalam proses penghitungannya untuk indikator kinerja tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik dapat diukur secara periodik per Triwulan.

### **3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. secara berjenjang akan dicapai melalui kinerja sasaran kegiatan (SK) merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di level Eselon II dan sebagaimana peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025. Capaian kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada Sasaran Kegiatan (SK) periode Triwulan II Tahun 2025 sebgaimana tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Capaian Kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Periode Triwulan II**  
**Tahun 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya tata pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Layanan Umum yang baik	1.1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,00 Nilai	100	Triwulan
		1.2 Indeks Pengelolaan Aset	2,25 Indeks	0	Tahunan
		1.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan	52,54 Nilai	0	Tahunan
		1.4 Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum	3,40 Skala Likert (1 – 5)	3,29	Triwulan

### 3.3. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 sebesar Rp. 89.856.566.000,- capaian realisasi anggaran Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 40.468.516.402,- atau 43,71% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 92.588.237.000,-. Pencapaian tersebut sudah melampaui target lampiran III DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025. Secara rinci, kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan, Pada awal tahun 2025 dilakukan penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan beberapa hal dengan keterangan sebagaimana tabel 5 berikut:

**Tabel 5**

Dinamika Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional Pada Biro Keuangan Tahun 2025

REVISI	TANGGAL	PAGU (Rp)	BUKA BLOKIR (Rp)	BLOKIR (Rp)	KETERANGAN
		11.158.431.000	-	0	Blokir Karena Belum Ada Persetujuan DPR dan efisiensi

Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum telah melakukan fasilitasi untuk revisi DIPA dan POK dalam rangka pemenuhan dokumen perencanaan, pembukaan blokir, serta refocusing dan realokasi terhadap kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional.

Untuk alokasi anggaran di Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum tidak ada perubahan alokasi anggaran sampai bulan Maret Tahun 2025.

Kinerja Anggaran Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum dilihat dari pencapaian nilai IKPA Badan Pangan Nasional berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional Jakarta V Nomor: S-699/KPN.1205/2025 Tanggal 3 April 2025 sebesar 100%. Secara rinci realisasi anggaran sesuai kegiatan, KRO, Output dan Komponen disajikan pada lampiran 2.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum periode Triwulan II Tahun 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2022 – 2025. Penyusunan laporan Triwulan lingkup Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada Tahun pertama sudah cukup berhasil. Keberhasilan tersebut dipertahankan untuk pencapaian indikator kinerj sasaran kegiatan selama tahun 2025.

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran program lingkup Sekretariat Utama. Terdapat 1 (satu) indikator yang akan mendapat dukungan dari Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum dalam pencapaiannya. Indikator tersebut yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi. Nilai capaian akan dihitung pada akhir tahun.
2. Alokasi anggaran Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada Tahun 2025 dari pagu DIPA awal Rp. 89.856.566.000,-. Untuk mendukung program Dukungan Manajemen, capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 40.468.516.402,- atau 43,71% dari pagu anggaran sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 92.588.237.000,-.
3. Pencapaian indikator kinerja kegiatan lingkup Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, untuk Indikator: Tingkat Kepuasan Layanan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum, Nilai Kinerja Anggaran, Tingkat Kepuasan Kepala, Sekretariat Utama dan Deputi Terhadap Layanan Bagian Tata Usaha Pimpinan, Protokol dan Rumah Tangga, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkungan Eselon I Badan Pangan Nasional, dan Realisasi

Anggaran Lingkup Eselon I Badan Pangan Nasional secara keseluruhan akan diukur pada akhir tahun.

4. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Tahun 2025 yaitu keterbatasan Infrastruktur serta SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi relevan dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum.
5. Terdapat beberapa indikator yang perlu pencermatan kembali terkait kesesuaian terutama indikator yang beririsan dengan unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional.

#### **4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

1. Memperkuat koordinasi lingkup Badan Pangan Nasional terutama dengan unit kerja eselon II dalam rangka melakukan tugas dan fungsi Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sebagaimana amanat dalam Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang SOTK.
2. Pembetulan tim kerja secara tugas akan bertanggungjawab dalam penyiapan dan penyesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi.

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Perjanjian Kerja Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **E. Rini Yusniana**  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**  
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Maret 2025

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



E. Rini Yusniana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BIRO KEUANGAN, PENGADAAN, DAN UMUM**  
**(REVISI KE-1)**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pengadaan, dan layanan umum yang baik	1.1 .Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89,5	Nilai
		1.2.. Indeks Pengelolaan Aset	2,25	Indeks
		1.3. Indeks tata Kelola pengadaan	50	Nilai
		1.4. Indeks kepuasan layanan keuangan pengadaan dan umum	3,14	Skala Likert (1-5)

No.	Nama Rincian Output	Anggaran (Rp.)
1	EBA.956 Layanan BMN	325.011.000
2	EBA.959 Layanan Protokoler	792.600.000
3	EBA.962 Layanan Umum	8.348.720.000
4	EBA.994 Layanan Perkantoran	79.057.285.000
5	EBB.951 Layanan Sarana Internal	2.313.304.000
6	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.645.500.000
7	FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.900.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>94.382.420.000</b>

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Jakarta, 8 Maret 2025  
Pihak Pertama

E. Rini Yusniana

**Lampiran 2. Realisasi Anggaran dan Fisik sampai dengan bulan Juni Tahun 2025**

Kode	Uraian	IKSP	Pagu Revisi	Realisasi sd. Triwulan II	Sisa Anggaran
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>					
Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan Umum					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
EBA.956	Layanan BMN		325.011.000	195.512.535	129.498.465
EBA.959	Layanan Protokoler		580.600.000	283.827.401	296.772.599
EBA.962	Layanan Umum		7.844.720.000	3.344.607.817	4.500.112.183
EBA.994	Layanan Perkantoran		81.429.806.000	35.372.234.145	46.057.571.855
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
EBB.951	Layanan Sarana Internal		1.314.054.000	860.657.060	453.396.940
EBB.965	Layanan Manajemen Keuangan		1.094.046.000	411.677.444	682.368.556

## **Lampiran 3. Kegiatan Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum sampai dengan Juni 2025**

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* 2024**

Dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* 2024. Bertempat di Ruang Rapat BB Biogen Kementerian Pertanian, Bogor. kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2025. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

### **2. Rapat Persiapan Usulan Koreksi LK BAPANAS**

Dalam rangka Rapat Persiapan Usulan Koreksi LK BAPANAS. Dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025. Bertempat di Ruang Rapat BB Biogen Kementerian Pertanian, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

### **3. Rapat Percepatan Penyerapan Anggaran Satker Dekon Badan Pangan Nasional 2025**

Dalam rangka Rapat Percepatan Penyerapan Anggaran Satker Dekon Badan Pangan Nasional 2025. Dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025. Bertempat di Ruang Rapat BB Biogen Kementerian Pertanian, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

### **4. Rapat Penyusunan Kertas Kerja UJK BPK RI**

Dalam rangka Rapat Penyusunan Kertas Kerja UJK BPK RI, dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025. Bertempat di Ruang Rapat BB Biogen Kementerian Pertanian, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

### **5. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited***

Dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited*, dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025. Bertempat di Ruang Rapat BISIP BSIP Kementerian Pertanian, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

### **6. Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited***

Dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan Keuangan *Audited*. Dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Mei 2025. Bertempat pada Ruang Rapat BSIP Kementerian Pertanian, Cikeumeuh, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntasi Biro KPU Badan Pangan Nasional

## **7. Rapat Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaporan Keuangan**

Dalam rangka Rapat Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaporan Keuangan. Dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025. Bertempat di Ruang Rapat PSIPKH Kementerian Pertanian, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.

## **8. Kegiatan Bimtek Aplikasi SAKTI Modul Persediaan**

Dalam rangka Bimtek Aplikasi SAKTI Modul Persediaan. Dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025. Bertempat pada Ruang Rapat BB Biogen Kementerian Pertanian, Cikeumeuh, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional





Bimtek Pencatatan Sistem Isntansi di BPPMP Bidang Boga  
2025-06-21 09:04:36



## 9. Rapat Pembahasan TLHP BPK RI TA 202

Dalam rangka Rapat Pembahasan TLHP BPK RI TA 2024. Dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025. Bertempat di Ruang Rapat Cikeumeuh Kementerian Pertanian, Bogor. Kegiatan dihadiri oleh Tim Pokja Pelaporan dan Akuntansi Biro KPU Badan Pangan Nasional.